ABSTRACT

Azra Danin Dita. NPM: 71220212011. Pertimbangan Hukum Penghulu dalam Penetapan Wali Nikah Anak Perempuan Luar Nikah (Studi Kasus di KUA Kecamatan Percut Sei Tuan). Skripsi, Medan: Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Agama Islam, Universitas Islam Sumatera Utara, 2026.

This study aims to: (1) identify the Islamic legal and statutory foundations used by Marriage Registrars (Penghulu) in determining marriage guardians for girls born out of wedlock; (2) examine the legal considerations of Marriage Registrars regarding lineage status and the eligibility of guardians (biological father, grandfather, or judge-appointed guardian) for girls born out of wedlock; and (3) analyze the implications of these legal considerations on the validity of marriages involving girls born out of wedlock.

This study employed a field research method with a qualitative approach conducted at the Office of Religious Affairs (KUA) of Percut Sei Tuan District, Deli Serdang Regency. Data were collected through interviews, observations, and documentation involving informants selected through purposive sampling, including the Head of KUA, marriage registrars, religious counselors, and parties related to the research problem. Data were analyzed through the stages of data reduction, data display, and conclusion drawing using content analysis. Data validity was ensured through prolonged observation, increased persistence, and source, technique, and time triangulation.

The results indicate that Marriage Registrars at the KUA of Percut Sei Tuan District determine marriage guardians for girls born out of wedlock based on Islamic law, the Compilation of Islamic Law (KHI), the Marriage Law, and regulations of the Ministry of Religious Affairs by applying the principles of protecting religion (Hifz ad-Din), protecting lineage (Hifz an-Nasl), realizing legal benefit, ensuring legal certainty, and preventing harm. The findings further reveal that the determination of marriage guardians involves examining the child's lineage status, the marital status of the parents, and supporting documents to assess the eligibility of the biological father, grandfather, or other lineage guardians. If no legitimate lineage guardian is found according to Islamic law, a judge-appointed guardian (wali hakim) is assigned. In addition, the validity of marriage is influenced by the fulfillment of marriage requirements and pillars, the completeness of marriage administration, the clarity of the guardian's status, and the legal status of the prospective spouses. Therefore, the legal considerations applied by Marriage Registrars not only ensure the validity of marriage according to both religious and state law but also provide legal protection, justice, and public benefit for all parties involved.

Keywords: ***Legal Considerations, Marriage Registrar, Marriage Guardian, KUA***

ABSTRAK

Azra Danin Dita. NPM: 71220212011. Pertimbangan Hukum Penghulu dalam Penetapan Wali Nikah Anak Perempuan Luar Nikah (Studi Kasus di KUA Kecamatan Percut Sei Tuan). Skripsi, Medan: Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Agama Islam, Universitas Islam Sumatera Utara, 2026.

Penelitian ini bertujuan untuk; 1) mengetahui dasar hukum Islam dan perundang-undangan yang menjadi acuan Penghulu dalam menetapkan wali nikah bagi anak perempuan yang lahir di luar nikah 2) untuk mengetahui pertimbangan hukum Penghulu terkait status nasab dan kelayakan wali (ayah biologis, kakek, atau wali hakim) untuk anak perempuan luar nikah 3) untuk mengetahui implikasi pertimbangan hukum Penghulu terhadap keabsahan pernikahan anak perempuan luar nikah.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan kualitatif yang dilaksanakan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi dengan informan yang dipilih menggunakan teknik purposive sampling, yaitu Kepala KUA, penghulu, penyuluh agama, serta pihak yang terkait dengan permasalahan penelitian. Analisis data dilakukan melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan menggunakan metode analisis isi (*content analysis*). Keabsahan data diuji melalui perpanjangan pengamatan, peningkatan ketekunan, dan triangulasi sumber, teknik, serta waktu untuk memperoleh hasil penelitian yang valid dan dapat dipercaya.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penghulu di KUA Kecamatan Percut Sei Tuan dalam menetapkan wali nikah bagi anak perempuan yang lahir di luar nikah berpedoman pada hukum Islam, Kompilasi Hukum Islam (KHI), Undang-Undang Perkawinan, dan peraturan Kementerian Agama dengan menerapkan prinsip menjaga agama (Hifz ad-Din), menjaga keturunan (Hifz an-Nasl), mewujudkan kemanfaatan hukum, memberikan kepastian hukum, dan menghindari kemudaratan. Temuan penelitian menunjukkan bahwa penetapan wali nikah dilakukan melalui pemeriksaan status nasab anak, status pernikahan orang tua, serta dokumen pendukung untuk menentukan kelayakan ayah biologis, kakek, atau wali nasab lainnya. Apabila tidak ditemukan wali nasab yang sah menurut syariat Islam, maka wali hakim ditetapkan sebagai wali nikah. Selain itu, keabsahan pernikahan dipengaruhi oleh terpenuhinya syarat dan rukun nikah, kelengkapan administrasi perkawinan, kejelasan status wali nikah, serta status hukum calon mempelai. Dengan demikian, pertimbangan hukum yang dilakukan penghulu tidak hanya menjamin keabsahan pernikahan secara agama dan negara, tetapi juga memberikan perlindungan hukum, keadilan, serta kemaslahatan bagi para pihak yang melangsungkan pernikahan.

Katakunci: : Pertimbangan Hukum, Penghulu, Wali Nikah KUA